

BAB 2

KERANGKA TEORI

A. Organisasi Keagamaan dan Dinamika Ekonomi

Kini tiba dalam arus putaran sejarah yang genting. Umat telah menjadi kekuatan massa yang ‘seolah-olah’ sadar dan yakin. Pada siapa saja yang dikatakan kafir dan pada orang yang disebut menghina. Persis ketika kehormatan itu tersinggung maka ummat bisa turun dan mengaliri jalanan. Aksi Bela Islam membawa bukti yang meyakinkan. Ratusan ribu umat menggenangi jalan protokol dan mengelilingi Monas. Diperintah oleh sebuah fatwa yang dituangkan dalam suasana yang panas: kompetisi politik menjelang Pilkada. Guncangan itu membuat banyak kalangan harus saling bertemu, berunding dan menegosiasikan kesepakatan. Soal aksi harus berjalan damai, tentang pengusutan harus tuntas hingga ditangkapnya sejumlah orang yang kena tuduhan makar. Politik kini menemukan suasana baru: bertarung kekuatan dengan memanfaatkan aksi massa. Ormas seperti FPI meroket dan bahkan pimpinannya khutbah di depan Presiden. Seajar dengan itu, banyak analisis yang melihat ini adalah gerakan yang harus diakui hasil dari kumpulan situasi sosial yang kompleks: kekalahan orang miskin, marginalisasi buruh hingga naiknya fundamentalisme. Saya tak membantah tapi punya pandangan sedikit berbeda. Saya melihat ini adalah gerakan yang diawali dari sebuah harapan yang mau karam.

Harapan itu mula-mula tumbuh saat Orde Baru tumbang. Keyakinan bahwa Partai Islam akan naik popularitasnya dan banyak orang akan bergabung

di dalamnya. Kenyataannya ternyata tidak demikian. Partai Politik Islam kian lama menjalankan aktivitas serupa dengan partai lain. Politisinya korup dengan pengurus yang serakah. Juga gagasan politik yang dibangunnya hampir tak ada: mengikuti irama pemilu dengan program yang sejajar dengan kepentingan para penguasa politik. Tak muncul politisi Islam yang segar, cerdas dan sederhana. Kumpulan politisi ini tampak hanya bicara di muka televisi, sesekali berdebat dan tiba waktu Ramadhan memberi ceramah. Pada soal terorisme, jarang mereka bicara apalagi soal seperti upah dan penggusuran. Para politisi ini tak mampu menjangkau harapan massa dengan guncangan tindakan yang bermakna. Lama-kelamaan serupa dengan rombongan sirkus yang muncul pada momen pilkada, pemilu dan bencana. Diam-diam ummat merasa tak butuh mereka dan bisa jadi menganggapnya hanya jadi beban sejarah. Petunjuk sempurna mengenai itu ada pada Pemilu: suara Partai Islam tak sebanyak massa Islam.¹³

Menyandarkan harapan pada ormas agama yang raksasa dengan usia tua juga sama saja. Organisasi ini terlampau mapan. Birokratisasi melanda pada mesin ormas yang sudah punya segalanya. Para ketua dipilih dengan mekanisme mirip Pemilu. Mereka jadi sosok elite: bicara dari pertemuan besar, bertamu ke Istana hingga datang hanya pada perhelatan raksasa. Retorika mereka jadi terlampau sopan, penuh basa-basi dengan dibawakan melalui gaya yang halus, aristokratik, dengan fokus yang abstrak. Lebih-lebih banyak mantan pejabat duduk sebagai pengurus dengan cakupan wewenang yang tinggi. Para

¹³ Eko Prasetyo, *Kelas Menengah Islam: Wajah Keagamaan Tanpa Ide Populis*, (Harian IndoPROGRES, 2019), h. 2.

aktivis di kampung yang menghidupkan kegiatan keagamaan tak banyak punya peran: mereka seperti tim sorak. Didatangkan dalam perhelatan muktamar dan suaranya hanya tercetak pada kertas suara. Saat mereka kena gusur, biaya pendidikan mahal, dan dikenai PHK: tak banyak yang diperbuat oleh para pengurus. Langka sekali Ormas Keagamaan besar membela kadernya yang kena gusur atau kena PHK. Organisasi itu jadi mirip rumah yang nyaman untuk para pengurus dengan dikelola mirip badan usaha. Faedahnya hanya untuk pengurus, penguasa dan pengusaha.¹⁴

Di hadapan pada situasi seperti itulah sesungguhnya umat sedang kecewa. Tak memiliki kebanggaan pada ormas maupun partai yang berjuang atas nama mereka. Pada saat bersamaan, muncullah ormas keagamaan yang lebih informal, radikal dan hidup di perkotaan. Bangunan kesadaran agama yang disusun oleh ormas-ormas baru, seperti FPI (Front Pembela Islam), MMI (Majelis Mujahidin Indonesia), MIUMI (Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia) hingga HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) dimana Islam adalah ‘segalanya’. Ormas yang menebarkan keyakinan kalau Islam itu unggul untuk soal apa saja: kesejahteraan, keadilan hingga kekuasaan. Mula-mula praktik keagamaan mereka selalu penuh dengan kritik atas tatanan: demokrasi, HAM hingga pluralisme. Secara piawai mereka merujuk bukti sosial yang sulit disanggah: kemiskinan dimana-mana, kesenjangan terus menganga dan keadilan hanya janji. Tanpa ragu ormas ini ada yang mencoba melayani kebutuhan itu semua: mendirikan pendidikan murah, membuat layanan

¹⁴ Ini data tahun 2000 dan penjelasan tentang Organisasi Filantropi ini dapat dibaca pada buku yang menarik: Amelia Fauzia, *Filantropi Islam: Sejarah dan Konstentasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia*, (Gading, 2017), h. 67-72.

kesehatan yang bisa dijangkau dan mendengar semua keluhan. Pada urusan hukum mereka kadang mengabaikan wewenang aparat: meyerbu tempat perjudian, menghakimi para penjudi hingga menekan praktik jual beli minuman keras. Upaya ini disambut dengan antusias oleh anak-anak muda yang merasa persoalan pengangguran, ketiadaan kesempatan kerja dan akses pendidikan mahal disebabkan oleh sistem yang ‘padat maksiat’. Cara pandang ini diikuti oleh penyelenggaraan jasa pendidikan murah, layanan untuk orang miskin hingga unit penanganan tanggap bencana. Ormas Islam hidup bukan dengan bekal ide Syariah melulu, tapi juga mahir mengakumulasi dana zakat, infak, shodaqah maupun wakaf untuk mengatasi krisis ekonomi.¹⁵

Banyak ormas Islam-di luar NU dan Muhammadiyah- mencoba mengembangkan kecakapan ini dan berhasil mengakumulasi dana dalam jumlah raksasa. Organisasi filantropi adalah salah satu elemen kekuatan Islam yang tumbuh, berkembang dan besar pasca Reformasi. Dikelola oleh kelompok Islamis yang punya hubungan, relasi dan bahkan beranggotakan aktivis dari ormas-ormas Islam di luar organisasi resmi Islam. Penggalangan bantuan yang semula untuk solidaritas Internasional beranjak pada isu tanggap bencana hingga penanganan kemiskinan. Para ‘Islamis’ mula-mula ingin menjawab krisis ekonomi, lama kelamaan meneguhkan diri sebagai organisasi filantropi modern. Organisasi yang memberi petunjuk membesarnya kekuatan kelas menengah Islam sekaligus wujud dari kehendak untuk meletakkan Islam dalam formasi struktur sosial yang lebih modern.¹⁶

¹⁵ Eko Prasetyo, *Kelas Menengah Islam....*, h. 3.

¹⁶ *Ibid.*,

Banyak produk berlabel Islam kemudian merajai pasar dengan keuntungan berlipat. Putaran bisnis yang menyuguhkan semua produk berlabel Islam menasar kelas menengah yang perilakunya-mengikuti istilah dalam riset pemasaran-: makin makmur, makin pintar, makin religius. Dalam istilah tertentu, mereka menempatkan kegiatan mengonsumsi itu sebagai praktik peribadatan. Contohnya, selalu menyoal halal-haram sebuah produk: khususnya bunga bank yang sejak awal posisinya kontroversial. Meminjam istilah Anthony Giddens, kelas menengah Islam sedang terlibat dalam ‘proyek tentang diri’: sesuatu yang secara sadar seorang individu terlibat di dalamnya dan terus-menerus memperbaiki dan meningkatkan kesadaran tentang diri.¹⁷

Mayoritas masyarakat gembira menyaksikan kebangkitan ini, terutama Perusahaan, Jasa Pemasaran hingga Lembaga Keuangan. Seperti sihir, tiap pelaku usaha meyakini bahwa kerinduan kelas menengah untuk hidup sesuai keyakinan harus dibuktikan tidak melalui praktik hidup sederhana tapi mengonsumsi apa saja yang berbau Islam. Itu sebabnya, ekspresi seorang muslim kelas menengah tampak dari keinginan untuk tampil ‘saleh, bersahaja, terbuka dan militan’. Unsur militan itu kentara dari keinginan untuk tetap melihat posisi Islam sebagai ‘eksklusif, unggul dan pasti benar’. Trend ini yang kemudian menerbitkan ustadz maupun ormas yang berusaha mendekati ‘suasana psikologis’ kelas menengah Islam. Banyak kemudian anjuran untuk memelihara sifat saleh dengan: upaya merumuskan garis batas dengan orang

¹⁷ Ninuk Mardiana Pambudy, *Gaya Hidup Suka Mengonsumsi dan Meniru: Beranikah Berinovasi*, (Prisma volume 31, 2012), h. 34.

kafir, mendorong ide-ide Syariah untuk membanjiri ruang publik dan melakukan intervensi pada setiap kegiatan ritual pada momen apa saja. Standar ber-Islam kemudian diterapkan untuk kegiatan publik apapun: pendidikan, jabatan politik hingga ruang ekonomi. Meski standar itu artinya memahami Islam yang sesuai dengan budaya hidup modern tanpa harus tampak fanatik atau terlampau sekuler. Jika dulu pada masa Orba itu muncul dalam figur Catatan Si Boy: ganteng, kaya dan punya banyak pacar, kini hadir dalam figur Fahri-tokoh dalam ayat-ayat Cinta-yang menanggapi apapun dalam tolak ukur Iman. Iman itulah yang jadi predikat untuk menilai situasi apapun, terutama situasi politik.¹⁸

Situasi politik ini sebenarnya memberi banyak peluang dan harapan. Peluang bagi lahirnya figur-figur Islam yang diharapkan sekaligus tampilnya gagasan Islam seperti yang diangankan. Eksperimen yang digulirkan kala itu adalah syariah Islam yang diterbitkan dalam Perda. Praktik Syariah ini sayangnya menimbulkan opini yang negatif dan bahkan cenderung menganggap ide ini bertentangan dengan nilai Demokrasi dan HAM. Promosi penegakan Syariah menimbulkan banyak kecaman meski sejak itu mulai muncul politisi maupun ormas yang tak henti-hentinya membangun kampanye mengenai penegakkan Syariah. Sengketa, polemik hingga kecaman bertaburan dimana-mana. Tak ada upaya serius untuk membawa perdebatan ini dalam kerangka yang lebih proporsional dan masuk akal. Para politisi seperti menemukan rumput kering untuk memanfaatkan sentimen ini. Dipacu oleh

¹⁸ Penjelasan menarik mengenai ini dapat dilihat pada Ariel Heryanto, *Identitas dan Kenikmatan: Politik Budaya Layar Indonesia*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia 2015).

banyak kasus, pemerintah tampaknya juga tak mau meredakan situasi ini kecuali dengan upaya maksimal membatalkan Perda-Perda yang bertentangan dengan konstitusi. Tapi ranting keyakinan itu sudah lama menjulur kemana-mana dan menunggu waktu untuk unjuk kekuatan. Kekuatan itu bisa muncul kalau menemukan ‘musuh dan sasaran’ yang cocok dan tepat. Musuhnya telah ada tapi waktunya yang belum muncul. Hingga pada saat Pilkada, ranting itu tiba-tiba menemukan sandaran.

Persaingan, pengukuhan posisi, perjuangan merebut kuasa sudah menjadi sejarah panjang kelas menengah Islam di Indonesia. Setidaknya Kuntowijoyo mencatat pergeseran itu muncul di penghujung abad XIX, saat kepemimpinan para santri dipegang oleh para haji. Semula kyai punya peran penting dalam melindungi dan menyebarkan paham keagamaan lewat pesantren. Prasyarat menjadi kyai tak mudah karena harus memiliki kompetensi pengetahuan, memiliki jalur genealogis hingga teruji dalam mendidik. Sedangkan haji hanya perlu modal biaya dan sejak kapal uap jadi alat transportasi maka kelas menengah mengalami kemudahan untuk naik haji. Haji merupakan ibadah kelas menengah yang modalnya hanya biaya. Orang yang sudah menunaikan haji memiliki posisi istimewa. Karena haji jadi sapaan yang mengandung nilai penghormatan. Diperantarai oleh panggilan haji itulah golongan menengah menemukan tempatnya dalam susunan hirarki di masyarakat.¹⁹

¹⁹ Kuntowijoyo, *Paradigma Islam Interpretasi untuk Aksi*, (Bandung: Mizan, 1991), h. 88.

Menarik untuk dicatat pertumbuhan masyarakat Arab yang punya ikatan dengan golongan menengah. Meski mereka tergolong ‘Timur Asing’ sama seperti Cina, tapi orang Islam tak pernah menganggap mereka saingan usaha. Mungkin karena kesamaan agama yang membuat mereka lebih mudah berbaur. Padahal pada saat itu orang Arab tinggal terpisah, seperti Pasar Kliwon di Surakarta, dengan adat istiadat, kepemimpinan dan sejarahnya sendiri. Salah satu perkumpulan yang kuat dan hingga sekarang tumbuh dengan memiliki pusat pendidikan adalah Al Irsyad – yang saat itu dirintis oleh orang-orang Arab. Paling penting dalam dinamika hubungan ini adalah orang Arab tak pernah dianggap sebagai ‘saingan’ ekonomi dan ini berbeda sekali dengan orang Cina. Laporan Kolonial Verslag memperlihatkan persaingan gawat antara pengusaha pribumi dengan Cina: pajak perusahaan, bagian dari pedagang pribumi terus menerus turun, sebaliknya para pengusaha Cina terus naik. Singkatnya, kaum pengusaha pribumi dalam usaha kecil mengalami ‘pelipatgandaan’ sedang perusahaan besar dipunyai oleh orang Cina. SI mula-mula berdiri sebagai usaha dagang untuk bersaing dengan pengusaha Cina.

Maka dalam pertumbuhan awalnya SI sangat anti Cina. Terlebih pemerintah kolonial memberi banyak hak istimewa untuk orang Cina. Sepanjang tahun 1913, pergolakan anti Cina menyebar ke kota-kota sepanjang Pantai Utara di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur, mulai dari Tangerang, terus ke Lasem, Rembang, Tuban, Surabaya dan Pasuruan. Isu rasialisme yang dinyalakan itu kemudian membawa banyak petaka hingga menimbulkan korban jiwa yang besar. Perbedaan Ideologi yang dilandasi oleh kenyataan atas kesenjangan yang memacu begitu rupa, hingga golongan kiri

menyuntikkan keyakinan marxis yang lebih sistematis sehingga kerusuhan tak terorganisir menjadi serangan yang diarahkan pada sasaran strategis. SI merah mengubah kesadaran reaksioner menjadi kesadaran anti kapitalisme dengan melakukan kegiatan pemogokan-pemogokan pada perusahaan kereta api, perkebunan, pabrik gula dan seluruh instalasi produksi milik para kapitalis. Sejak itulah prakarsa gerakan diambil alih oleh SI kiri yang meletakkan kategori umat dalam istilah lebih proletar, 'wong cilik'.²⁰

Sumbangan SI Merah teramat besar dalam perjuangan SI: di samping menghidupkan unsur populis dalam Islam juga meletakkan iman dalam sebuah proyek perubahan sosial yang konkrit. Saat itulah banyak rakyat miskin bergabung karena melihat agama tak berpusat pada kegiatan ritual, tetapi mengajak mereka untuk memasuki pertarungan dengan kenyataan yang timpang. Pada saat bersamaan, elite dengan massa melalui SI merah berbaur, tanpa jarak dan membangun aliansi yang erat. Muncullah sosok dai yang nekad, militan dan cerdas: Haji Misbach. Begitu pula tuntutan SI terkonsentrasi pada perombakan tatanan sosial yang mendasar dengan diawali pada perlindungan atas kaum buruh. Misalnya, SI Semarang yang secara aktif mendorong pemogokan para buruh karena ulah perusahaan yang sewenang-wenang, menentang kebijakan pemerintah dalam menempatkan wakil di parlemen yang dijuluki sebagai 'Boedak Setan Oeang', hingga membentuk sayap kaum miskin radikal, bernama Sarekat Kere (SK).²¹ Secara terus-menerus SI melancarkan

²⁰ Kuntowijoyo, *Muslim Tanpa Masjid*, (Bandung: Mizan 2001), h. 25.

²¹ Yus Pramudya Jati, *Menjadi Merah: Gerakan Sarekat Islam Semarang 1916-1920*, (Yogyakarta: Kendi, 2017), h. 56.

protes yang berbuah pada penangkapan dan pembuangan hingga pemerintah Kolonial merasa urgen untuk menindas SI secara lebih keji. Penindasan yang lama-kelamaan menjadi benih perpecahan SI yang lebih serius dan signifikan.

Diantaranya kaum santri golongan menengah tak berkenan kiprah SI kiri yang dominan, hingga pada tahun 1923 unsur komunis dalam SI dienyahkan. Bara konflik yang kelak akan membuat posisi SI terus merosot terutama dalam mengikat loyalitas wong cilik. Tak lama kemudian, Muhammadiyah, tulang punggung golongan menengah santri, keluar dari SI tahun 1927. Begitu pula para ulama tradisional memutuskan untuk keluar SI tahun 1926 dengan mendirikan NU (Nahdlatul Ulama). Sejak itu gerakan Islam mengalami kemunduran penting: kehilangan basis wong cilik, surutnya peran kritis golongan menengah dan pengucilan peran ulama hanya sebagai pendidik. Padahal ancaman yang laten dan menghantui adalah kapitalisme yang terus mendesak sekaligus mengancam posisi kelas menengah. Bahkan sejak saat itulah bangunan kesadaran keagamaan selalu memandang ummat dalam pengertian yang subjektif-normatif bukan pada kepentingan yang objektif-empiris dengan melihat unsur 'kelas'. Unsur yang dilenyapkan dalam gerakan Islam di kemudian hari dan di masa-masa berikutnya. Itulah fase yang kemudian oleh Castles dikatakan sebagai 'Islam yang terlampau lemah dan terisolasi hingga tak dapat memelopori pengorganisasian untuk pembangunan ekonomi' sekaligus, sebagaimana dinyatakan McVey, Islam yang selalu menganggap 'kedudukannya sebagai anak tiri yang tak dikehendaki' dan lama

kelamaan ‘kehilangan kemampuan untuk melakukan analisis atas formasi sosial karena mengabaikan ideologi yang berdasar kelas’.²²

Situasi ini terus memburuk di masa Soekarno dan makin dikucilkan pada masa Orba. Politik massa mengambang telah membuat Islam berantakan segalanya: sebuah upaya politik yang memiliki agenda Islam dianggap membangkang dan kebijakan ekonomi yang kian tak memihak pengusaha Muslim. Hanya lapisan terdidik yang masih bisa disandarkan harapan, terutama mereka bergerak di sektor jasa: dokter, dosen, pengacara, budayawan hingga kaum profesional lainnya. Sayangnya pada umumnya lapisan ini kemudian menjadi komunal dengan menegakkan keyakinan pada tiang terbentuknya identitas sebagai sosok muslim. Di samping karena kegagalan dan ketidakpercayaan pada ormas agama yang ada, juga pembangunan ekonomi yang menimbulkan banyak kesenjangan. Tanpa dasar ‘analisis kelas’ muncullah banyak asosiasi agama yang merangkul keyakinan dengan meneguhkan pada otoritas buta. Pada saat itulah muncul serta mengorbit para pemimpin keagamaan yang berasal dari berbagai macam latar belakang: bermodal kemampuan bahasa Arab, memiliki doktrin yang eksklusif dan meyakini bahwa perubahan harus diawali dari perumusan identitas sebagai seorang muslim. Benih-benih itulah yang kelak kemudian dirangkul oleh Orde Baru menjelang mau runtuh: membangun asosiasi politik yang meneguhkan simbol Islam. ICMI salah satunya, tapi banyak juga yang kemudian karena ‘proteksi ekonomi’ pada

²² *Ibid.*,

akhir kekuasaan Orde Baru terbit berbagai asosiasi politik independen yang tulang-punggungnya adalah pengusaha.²³

Pengusaha Muslim itu dibangun melalui insentif ekonomi sekaligus proses deregulasi yang gencar dilakukan oleh Orde Baru. Para pengusaha ini memang menjadi 'mitra' negara karena lisensi hingga dukungan politik tetap mengandalkan penguasa. Loyalitas pengusaha ini bukan pada kekuasaan semata tapi juga iklim pasar ekonomi yang terbuka. Banyak himpunan pengusaha ini memang harus bersaing dengan pengusaha non-pri, yang diantaranya telah jadi sekutu lama Soeharto. Saat ketika tiap pengusaha musti membina hubungan baik dengan kekuatan politik maka identitas 'muslim' selalu jadi landasan politik untuk bertarung. Terlebih secara berangsur-angsur kekuatan politik Islam menjadi pendukung utama kekuasaan Soeharto saat mau berakhir: melalui ICMI utamanya. Terjadilah perpaduan yang kemudian dinamai oligarkhi: perpaduan kekayaan dan kekuasaan politik-birokratis yang diartikulasikan melalui pembauran antara keluarga penguasa dengan keluarga pengusaha. Terutama di masa reformasi, dimana muncul banyak aktor politik yang kerap kali memanfaatkan sentimen agama karena punya keinginan untuk duduk dalam struktur kekuasaan. Kini aktor-aktor itu sedang memasuki panggung politik dengan memanfaatkan kesempatan 'konstitusional' yang sudah disediakan. Lapisan borjuis reaksioner ini mulai meyakini bahwa mereka tak lagi tergantung pada institusi kekuasaan otoriter yang terpusat, sebagaimana pada masa Orba, tapi mengembangkan relasi ganda: pada satu sisi tetap membangun hubungan patronase dengan para predator tapi juga di sisi lain juga

²³ *Ibid.*,

hendak mendirikan kapitalis domestik dengan membangun kerajaan bisnis.²⁴ Kesempatan melakukan itu semua sekarang sedang berjalan.

Ruang kesempatan itu jadi panggung ‘pertarungan’. Kelas borjuasi Islam berada dalam persaingan ekonomi yang sengit. Kompetisi ekonomi yang keras, penuh kompromi dan brutal mulai terjadi antar kekuatan dengan berusaha untuk menguasai negara. Negara dalam sistem yang neoliberal sekarang ini menjadi ruang berebut: bukan hanya perannya sebagai fasilitator dengan kekuatan modal tapi juga negara telah jadi ‘sumber pemasokan’ logistik yang berarti. Proyek-proyek yang berbuah korupsi, termasuk haji dan kitab suci, menjadi semacam papan petunjuk betapa banyak kebijakan yang mengalirkan laba. Aliran uang itulah yang membuat sengketa kepentingan antar kekuatan ekonomi jadi panggung besar yang terus dinyalakan. Rasialisme hanya ‘kedok’ bagi perebutan asset ekonomi yang kini terkonsentrasi pada otoritas negara. Kelas menengah Islam yang hidup dalam iklim keagamaan puritan kian meyakini bahwa dalam urusan ekonomi politik kini waktunya mereka ambil peran terdepan. Tapi mereka juga tahu bahwa ‘peta sosialnya’ rumit, kompleks dan kompetitif sehingga saluran partisipasi politik apa saja akan mereka coba. Pintu kesempatan apapun yang bisa mempertahankan posisi ‘kelas menengah’ dan mendorong mobilitas mereka untuk ‘berkuasa’ akan terus diperjuangkan.

B. Dinamika Antar Kelompok

²⁴ Vedi R Hadiz dan R. Robison, *Ekonomi Politik Oligarki dan Pengorganisasian Kembali Kekuasaan di Indonesia*, Prisma vol 33, 2014.

Konflik horizontal berbasiskan isu keagamaan telah menjadi fenomena yang sangat mengkhawatirkan. Fenomena kekerasan atas nama agama sedemikian rupa telah menjejala di banyak daerah, bahkan secara eksplosif muncul di beberapa Negara Timur Tengah akhir-akhir ini. Dalam pembahasan majalah Suara Muhammadiyah Edisi September 2013, konflik horisntal terkait dengan isu agama dipahami sebagai salah satu ancaman paling serius dalam konteks harmoni sosial, dibandingkan dengan konflik horizontal lainnya. Hal ini terkait dengan pandangan bahwa agama sejatinya mengajarkan tata harmoni masyarakat, perdamaian, cinta kasih namun dalam manifestasinya konflik sosial berbasis agama lebih sering hadir dalam wajah kekerasan. Bahkan lebih dari itu, konflik horizontal berbasis agama seringkali melibatkan pilar-pilar penjaga moral masyarakat, seperti tokoh agama dan institusi peribadatan, yang seharusnya para pemuka agama dan institusi keagamaan menjadi pilar dari harmoni sosial itu sendiri.

Isu konflik horizontal berbasis agama di Indonesia, mengalami dinamika yang sangat berarti, dari konflik horizontal lintas kelompok agama, seperti kasus di Poso, Ambon, sampai dengan issue konflik horizontal dalam satu kelompok agama, semisal dalam masyarakat Islam seperti kasus Ahmadiyah, Syiah, Wahabi, kelompok Islam tradisional, kelompok Islam modernis. Konflik horizontal tersebut sampai dalam titik yang cukup mengkhawatirkan, di mana klaim-klaim kebenaran sepihak sampai menempatkan pihak lain sebagai kafir, halal darahnya.

Konflik horizontal dalam kelompok keagamaan Islam juga mulai berkembang dan menunjukkan kutub ketegangan yang mulai menguat.

Terdapat kecenderungan terjadinya pengkategorisasian gerakan keagamaan Islam di Indonesia, yakni indigenous Islam Indonesia seperti Muhammadiyah, NU, dan Islam Transasional seperti Salafi, Jamaah Tabligh, Hizbut Tahrir, Tarbiyah/Ikhwatul Muslimin, atau mengutanya gerakan baru Islam di Indonesia yang juga unik seperti Majelis Mujahidin Indonesia, Ahmadiyah Indonesia, Front Pembela Islam, Majelis Tafsir Al-Quran. Pengkategorisasian ini dalam konteks tertentu menimbulkan berbagai masalah, seperti muncul stigma bahwa Islam indigeneous atau Islam Nusantara sebagai islam yang cair, moderat, sedangkan Islam transnasional sebagai fenomena Islam yang militant, kaku, dan konservatif, atau gerakan baru Islam yang juga memunculkan isu konflik keagamaan yang baru. Dua organisasi besar Islam indigenous Indonesia, seperti Muhammadiyah dan NU, mengalami gesekan hubungan dengan Islam transnasional, terkait dengan adanya dugaan infiltrasi pemikiran Islam Transnasional ke dalam struktur organisasi dan amal usaha Muhammadiyah maupun NU. Gesekan hubungan ini melahirkan pilihan kebijakan organisasional dari Muhammadiyah dan NU untuk menjaga jarak hubungan untuk mengurangi benturan-benturan lebih jauh melalui pembuatan Surat Keputusan Organisasi untuk memproteksi dari kemungkinan infiltrasi pemikiran baru. Iritasi hubungan di tingkat organisasi, dalam batas tertentu dapat dikelola dengan mengeluarkan kebijakan legal formal untuk saling menghormati dan tidak saling menginfiltrasi pemikiran. Namun di tingkat akar rumput, benturan-benturan seringkali muncul dan ada kecenderungan frekuensi benturan semakin tinggi. Misal dengan pelarangan aktivitas kelompok organisasi tertentu untuk menggunakan sarana ibadah (masjid) yang

diklaim sebagai wilayah binaan organisasi Islam tertentu. Kondisi ini kemudian menyebabkan reaksi negative dari kelompok organisasi keagamaan yang dilarang. Bahkan dalam batas tertentu, mulai ada kecenderungan bahwa dua organisasi besar Islam di Indonesia, yakni Muhammadiyah dan NU mulai ada sedikit ketegangan terkait dengan issue de-radikalisasi, yang juga sering dimaknai dengan De-Wahabisasi. NU sangat aktif terlibat dalam program de-radikalisasi faham keagamaan Islam, untuk mengembalikan Islam sebagai agama yang moderat. Namun seringkali terdapat stigma yang berlebihan dan tidak bertanggung jawab, bahwa Muhammadiyah sering ditempatkan secara sefihak sebagai organisasi yang memiliki keterdekatan dengan aliran Wahabi. Sehingga de-radikalisasi faham keagamaan dinilai sebagai upaya de-Muhammadiyahisasi. Kondisi inilah yang kemudian berupaya diproporsionalkan oleh Muhammadiyah, agar program de-radikalisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah tidak menyudutkan faham keberagaman Muhammadiyah dan tidak menghadap-hadapkan antara Muhammadiyah dan NU secara diametral.

Studi tentang konflik antar kelompok dalam Islam sesungguhnya merupakan studi yang sangat tua. Muhammad Abu Zahrah telah menulis sebuah buku *Aliran Politik dan Aqidah Dalam Islam*, memaparkan secara jelas tentang fenomena konflik antara Sunni, Syiah dan Khawarij yang menahun, bahkan sampai saat ini masih terasakan. Dalam studi tersebut, Muhammad Abu Zahrah mengajukan tesis bahwa konflik yang terjadi pasca Rasulullah Muhammad SAW wafat, berakar dari persoalan Muamallah yakni terkait dengan siapa yang seharusnya menjadi pemimpin pasca Rasul Muhammad

SAW. Namun karena penyelesaian politik tidak terlembagakan dengan baik, maka terjadilah akumulasi kekecewaan di masing-masing kelompok yang kemudian mengkristal menjadi ideologi baru. Inilah yang kemudian difahami sebagai perubahan konflik dari konflik muamallah (hubungan antar manusia) yang seringkali sifatnya relative dan terbuka menjadi konflik aqidah (hubungan dengan Tuhan) yang bersifat absolut, eksklusif dan prinsipal.²⁵

Sampai saat ini, konflik Sunni Syiah lebih menunjukkan sebagai konflik ideologis, yang seringkali menihilkan satu sama lain. Bagi kalangan kelompok Syiah yang ekstrim, siapapun yang tidak mengakui kepemimpinan Ali bin Abi Thalib sebagai Imam atau pemimpin, maka kelompok tersebut dipahami sebagai kelompok jahiliyyah dan sesat.

Demikian pula bagi kalangan Sunni, juga menempatkan Syiah sebagai kelompok yang sesat karena telah menempatkan posisi Ali bin Abi Thalib dan perkataan-perkataan dalam tempat yang sangat mulia. Representasi konflik Sunni dan Syiah secara ketat, dan saling menihilkan satu sama lain terepresentasikan dalam hubungan yang kaku antara Arab Saudi, yang mengklaim sebagai pewaris utama Sunni, dan Iran sebagai pewaris utama Syiah.²⁶

Studi tentang penyebab konflik organisasi Islam yang berbasis transnasional dilakukan oleh Ali Jabir. Dalam studi masternya, Ali Jabir melakukan studi secara mendalam tentang basis teologi dan dakwah dari

²⁵ Lihat dalam Muhammad Abu Zahrah, *Aliran Politik dan Aqidah Dalam Islam*, (Jakarta: LOGOS, 2006), h. 76.

²⁶ Lihat dalam Surwandono, *Pemikiran Politik Islam*, (Yogyakarta: LPPI UMY, 2006), h. 56.

organisasi Jamaah Tabligh, Hizbut Tahrir, Salafi, maupun Ikhwanul Muslimin, dan Ashar Muhammadiyah. Konflik antar organisasi ini sedemikian rupa sangat kuat, bukannya hanya dalam dataran metode dakwah namun juga dalam basis pemaknaan terhadap beberapa asas Islam.²⁷

Interaksi antar *harakah* (gerakan) Islam di banyak negara di Timur Tengah dalam mendiskusikan konsepsi dan praktikal Islam menghadirkan konflik yang tidak elok, di mana terdapat kecenderungan besar timbulnya tradisi saling mengkafirkan (tafkiriyyah), bahkan kemudian saling menghalalkan darahnya sudah menjadi fenomena yang sangat mengerikan. Kondisi ini telah menarik perhatian Yusuf Qardhawi, untuk menyusun sebuah pemaknaan baru dalam memaknai perbedaan.

Pemaknaan yang benar dan sah terhadap perbedaan akan semakin mencerdaskan umat Islam dan terhindar dari politik pecah belah yang justru merugikan Islam serta bertentangan dengan nalar Islam itu sendiri. Yusuf Qardhawy yang memperkenalkan konsepsi memaknai perbedaan dalam dinamika masyarakat dengan istilah fiqh ikhtilaf.

Qardhawy membuat klasifikasi perbedaan pemikiran keagamaan Islam dalam dua kategori besar; Pertama, perbedaan yang disebabkan karena akhlaq. Perbedaan karena faktor akhlaq, diposisikan sebagai bentuk perbedaan yang merusak dimana seringkali dilandasi oleh sifat membangga-kan diri, buruk sangka pada fihak lain, egoisme dan menuruti hawa nafsu, fanatik kepada golongan atau mazhab, fanatik kepada negeri, daerah, partai, jama'ah atau

²⁷ Hussein bin Muhsin bin Ali Jabir, *Membentuk Jama'atul Muslimin*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 89.

pemimpin.²⁸ Perbedaan seperti ini hendaknya yang harus dihindari oleh organisasi keagamaan berbasis Islam, karena karakter konfliknya menjadi hitam putih, saling mengkafirkan, bahkan saling menghalalkan darah.

Kedua, perbedaan yang disebabkan karena faktor pemikiran. Sedangkan perbedaan disebabkan faktor pemikiran merupakan sebuah kemestian di dalam Islam. Dalam pandangan Qardhawy, perbedaan karena masalah pemikiran bisa dimengerti dan bisa diterima karena sebab-sebab berikut: Pertama, Tabiat Agama Islam, hal ini disebabkan oleh karakter hukum Islam yang mempunyai sifat *manshuh 'alaih* (ditegaskan dengan eksplisit) dan ada pula yang *maskut'anhu* (ditegaskan dengan implisit). Juga ditemukan hukum atau ayat yang *muhkamat* (jelas, terperinci) ataupun yang *mutasyabihat* (tersembunyi, dan perlu ta'wil lebih jauh). Ada juga yang mempunyai sifat *qath'iyyah* (pasti) atau *dhanniyat* (belum pasti), ada yang *sharih* (jelas) ada juga yang *mu'awwal* (memungkinkan penafsiran). Misal dalam konteks pemikiran politik tentang posisi syariah dalam negara, terdapat kelompok yang menyatakan wajib penerapan syariah secara formal, sedangkan kelompok yang lain menempatkan posisi syariah hanya sebatas optional.²⁹ Kedua, Tabiat Bahasa (Arab), bahasa utama yang digunakan dalam sumber kebenaran Islam adalah bahasa Arab. Dalam studi bahasa Arab, terutama dalam perbincangan dalam lafadh, ada kecenderungan lafadh yang mempunyai banyak arti

²⁸ Lihat dalam Yusuf Qardhawy, *Fiqhul Ikhtilaf* (Terjemahan), (Jakarta, Gema Insani Press, 2005), h. 45.

²⁹ Lihat lebih jauh dalam Syafi'I Anwar, *Pemikiran dan Aksi Politik Islam di Indonesia*, (Jakarta, Paramadina, 1997), h. 156.

(*musytarak*) dan ada yang memiliki makna *majas* (kiasan). Ada juga lafazh yang mempunyai sifat *khash* (khusus) adapula yang mempunyai sifat *'aam*. Ada lafazh yang mempunyai sifat *rajih* (kuat) ada yang kurang kuat (*marjuhah*). Sangat bervariasinya makna sebuah lafazh dalam bahasa Arab, menyebabkan seseorang dalam memahami sebuah ayat ataupun hadits seringkali berbeda, karena yang satu menggunakan makna dasar sedangkan yang lainnya menggunakan makna kias. Semisal dalam konteks sejarah Islam, terdapat perbedaan yang signifikan dalam perkara kedudukan perempuan sebagai pemimpin politik, sebagian besar Imam memahami hadits tentang kepemimpinan dalam politik dalam konteks keumuman lafadz, sehingga fatwa tentang kepemimpinan perempuan dalam politik menjadi lebih konservatif. Sedangkan dalam pandangan Imam Abbas, memberikan ruang terbuka untuk memahami hadits dengan menggunakan kekhususan sebab, sehingga fatwa tentang kepemimpinan perempuan dalam politik menjadi lebih terbuka.³⁰ Ketiga, Tabiat Manusia, dalam men-sikapi hukum Islam yang plural, kebanyakan manusia menuruti kecenderungan yang selaras dengan kondisi yang melekat dengan dirinya, maupun pengalaman terstruktur yang selama ini membentuk pola pikir seseorang. Perbedaan sifat-sifat manusia dan kecenderungan psikologisnya ini akan mengakibatkan perbedaan mereka dalam menilai sesuatu, baik dalam sikap dan perbuatan. Perbedaan karena masalah tabiat manusia adalah sesuatu yang niscaya, sehingga dalam contoh sejarah Islam, ada kecenderungan terdapat perbedaan artikulasi Islam dalam 4

³⁰ Lihat dalam Yusuf Qardhawy, *Berpolitik Menurut Al-Qur'an dan Sunnah*, (Jakarta, Gema Insani Press, 2003), h. 98.

sahabat Khulafaur Rasyidin, yakni Abu Bakar, Umar bin Khattab, Ustman bin Affan maupun Ali bin Abi Thalib. Rasulullah membiarkan perbedaan artikulasi Islam, dan difahami sebagai sesuatu yang alamiah, sepanjang tidak keluar dari nilai dasar Islam. Keempat, Tabiat Alam dan kehidupan, tabiat alam yang ditempati manusia mempunyai corak topografi, geografi, iklim dan cuaca yang berbeda. Perbedaan lingkungan memberikan pengaruh yang cukup besar dalam pemikiran seseorang, semisal orang yang tinggal di gurun pasir mungkin akan berbeda dengan orang yang tinggal di desa yang subur. Mazhab fiqh seringkali berbeda tidak bisa dilepaskan dari kondisi alam sekitar yang memang menghendaki pemikiran lebih lanjut (kontekstual). Semisal, Imam Syafi'I membuat fatwa yang berbeda karena perbedaan wilayah atau geografis, dalam kitab qaul qadim wa qaul jaddid.

C. Bentuk-bentuk Aktualisasi Ekonomi Organisasi

Organisasi adalah bentuk yang selalu ada baik dalam sektor ekonomi, pendidikan, bahkan budaya yang notabene memiliki komunitas tertentu. Manajemen di dalam organisasi memiliki struktur yang dapat menjalankan suatu usaha dengan teratur dan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan dari usaha tersebut. Dunia ekonomi merupakan salah satu sektor yang memiliki bentuk-bentuk organisasi yang cukup beragam. Tentu saja karena tanggung jawab yang ada di dalamnya sangat besar dan membutuhkan organisasi yang sudah terstruktur dengan tanggung jawab yang sudah dibebankan masing-masing dalam setiap strukturnya.

Organisasi dalam mengaktualisasi ekonomi dapat disebut juga sebagai organisasi bisnis. Selain memiliki tanggung jawab yang perlu diperhatikan,

organisasi bisnis juga selalu melakukan perbaikan khususnya dalam dunia industri yang di dalamnya meliputi produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan dan memberikan profit yang sesuai.

Terdapat setidaknya tiga bentuk bentuk organisasi dalam manajemen yang digunakan hingga saat ini. bentuk organisasi merupakan sebuah bentuk hubungan dan tanggung jawab yang digunakan dalam sebuah perusahaan. Anda juga dapat mengetahui pihak mana yang memiliki wewenang antar elemen yang ada di dalam sebuah organisasi perusahaan. Hingga saat ini, tiga bentuk yang masih dikenal adalah sebagai berikut ini:³¹

a. Bentuk organisasi garis atau *Linear Organizations*

Organisasi ini termasuk memiliki bentuk yang paling sering digunakan dan dikenal dengan baik dalam dunia manajemen. Organisasi ini menghubungkan secara langsung atasan hingga bawahan dalam mode vertikal. Pimpinan tertinggi dalam sebuah perusahaan berhubungan secara langsung dengan bawahan bahkan hingga jabatan yang terendah. Organisasi ini biasa digunakan oleh perusahaan kecil atau yang baru merintis usaha awal.

b. Organisasi Lini dan Staff

Bentuk organisasi ini merupakan gabungan dari organisasi lini, namun sudah memiliki asas komando. Pemimpin dalam perusahaan tidak hanya memberikan komando atau wewenang, namun juga memberikan masukan bahkan saran-saran yang berguna bagi perusahaan. Biasanya

³¹ <http://jurnalmanajemen.com/bentuk-bentukorganisasi/>, diakses pada hari Kamis, 25 April 2019.

hubungan atasan dengan bawahan tidak memiliki sifat yang langsung. Pemimpin utama hanya dipegang oleh satu orang saja, sisanya adalah staff yang membantu kinerja dan melakukan komunikasi kepada bawahan. Bentuk organisasi ini tentunya sangat efektif apabila perusahaan sudah memiliki banyak karyawan.

c. Organisasi Fungsional

Salah satu bentuk organisasi ini menyusun atasan dan karyawan untuk menjadi kesatuan yang memiliki bidang tugas secara jelas. Tidak heran meskipun memiliki pemimpin utama satu orang saja, biasanya terdapat kepala dalam bidang-bidang yang digunakan oleh perusahaan. Pembagian tugas ini merupakan upaya yang dilakukan agar masalah-masalah dalam perusahaan dapat diatasi dengan baik.

d. Organisasi Lini dan Fungsional

Pada organisasi ini tentu saja merupakan gabungan dari bentuk Lini dan fungsional yang biasa diterapkan dalam perusahaan dengan skala yang besar. Wewenang dari organisasi ini diberikan kepada pimpinan tertinggi, namun kembali dilimpahkan pada kepala unit yang ada di bidangnya. Permintaan pekerjaan tidak memandang jabatan dalam perusahaan, satu tim harus melakukan kerjasama agar tugas segera selesai. Pembagian pekerjaan ini membuat Anda akan sulit membedakan tugas pokok dan tugas bantuan, karena keseluruhan dikerjakan bersama-sama.

e. Organisasi Lini, fungsional, Staff

Penjelasan organisasi ini memiliki ciri-ciri yaitu masuk ke dalam organisasi besar dan terkadang sedikit rumit karena banyaknya orang di

dalamnya. Karyawan yang ada di bentuk organisasi ini memiliki 3 unsur. Pertama yaitu karyawan yang memiliki tugas pokok, tugas bantuan, dan yang terakhir adalah karyawan dengan tugas fungsional. Setiap karyawan telah memiliki kewajiban masing-masing yang tentunya harus diselesaikan masing-masing.

f. Organisasi Komite

Pada organisasi ini memiliki tugas kepemimpinan yang dilaksanakan bersamaan atau kolektif. Terdapat dua macam staff yaitu executive dan staff dan biasanya executive committee atau pimpinan komite ini terdiri dari banyak orang yang disebut dengan dewan. Biasanya organisasi ini digunakan untuk perusahaan yang memiliki saham dari banyak orang.